



PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN PANDEMI COVID – 19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020, WHO telah menetapkan corona virus 2019 (covid-19) sebagai pandemi global. pandemi covid-19 bersifat luar biasa dan berdampak luas bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus (covid-19). Kinerja instansi pemerintah dalam menangani pandemi covid-19, perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Rekaman dari cara instansi pemerintah dalam penanganan covid – 19 tersebut menjadi warisan dokumenter dalam konteks pengurangan dan manajemen risiko bencana. warisan dokumenter tersebut merupakan sumber daya penting untuk memberikan perspektif historis mengenai upaya pemerintah maupun warga Negara dalam penanganan pandemik covid-19 sebagai bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip termasuk arsip dalam bentuk digital.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi corona virus 2019 (covid-19) atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan Arsip Penanganan corona virus Covid -19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

TUJUAN

Memberikan panduan terhadap instansi pemerintah sebagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan penyelamatan arsip penanganan pandemi covid- 19 sebagai bukti akuntabilitas kinerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin ketersediaan arsip untuk generasi yang akan datang.

RUANG LINGKUP

Penyelamatan arsip penanganan pandemi covid -19 oleh instansi pemerintah pencipta arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan dalam bentuk arsip tekstual, foto maupun audio visual.

KEBIJAKAN

1. Setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah pencipta arsip.
2. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan covid- 19 dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pendataan dan identifikasi arsip;
 - c. penataan dan pendaftaran arsip;
 - d. verifikasi / penilaian arsip; dan
 - e. penyerahan arsip statis.
3. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan covid – 19 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan covid - 19 Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kearsipan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

KRITERIA ARSIP PENANGANAN COVID – 19

NO	KRITERIA ARSIP PENANGANAN COVID-19	CONTOH ARSIP
1	arsip yang tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan COVID-19	Peraturan Presiden, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Rektor mengenai kebijakan penanganan Covid-19, dll
2	arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19	Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 hingga perubahannya menjadi KPC-PEN, Pemberlakuan PPKM, peraturan dan informasi mengenai prosedur perjalanan transportasi selama pandemi, dll
3	arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19	Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya peran inspektorat daerah dalam pengawasan, Program KPK dalam supervisi dan pengawasan pelaksanaan anggaran khusus Covid-19, dll
4	arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19	Pengerahan BIN dalam rangka vaksinasi, relawan covid oleh Iluni UI, TNI Polri, arsip mengenai realokasi dan <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan Covid-19, dll
5	arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan COVID-19	Laporan perkembangan penanganan Covid-19 di skala nasional dan daerah yang dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19/KPC-PEN, dll
6	arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung	Pemberian bantuan sosial, bantuan pekerja, bantuan UMKM, insentif pajak, subsidi kepada swasta, dll
7	arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset	Inovasi pembuatan alat deteksi Genose, program pembuatan vaksin di dalam negeri, pembuatan rumah sakit khusus Covid-19, hasil-hasil penelitian mengenai Covid-19, informasi statistik mengenai persebaran penularan Covid-19, dll

CONTOH PENGISIAN DAFTAR ARSIP COVID - 19

NO.	KODE KLASIFIKASI	URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. SEKRETARIAT					
1	443.4	Pemberitahuan dari DinKes untuk menindaklanjuti sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi covid 19	11 Maret 2020	3 lembar	Tekstual Fotocopy
2	061.2	Pengaturan Jam Kerja Hari Jum'at	19 Maret 2020	1 lembar	Tekstual Fotocopy
3	440	SE tentang antisipasi resiko penularan infeksi corona virus disease (covid-19) pada area tempat kerja, fasilitas umum dan transportasi publik di Kabupaten Kudus	20 Maret 2020	4 lembar	Tekstual Fotocopy
4	045.2	Surat Pengantar dari BKPP 1. SE Bupati Kudus tgl 24 Maret 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan instansi Pemkab Kudus 2. Surat PIT. Kepala BKPP kab. Kudus tgl 24 Maret 2020 tentang mekanisme pelaksanaan WFH bagi ASN pd aplikasi SiHadir dan e-Performance	24 Maret 2020	1 berkas	Tekstual Fotocopy
5	800	Mekanisme pelaksanaan WFH bagi ASN pada aplikasi SiHadir dan Eperformance dari BKPP	24 Maret 2020	4 lembar	Tekstual Fotocopy
6	045.2	Surat Pengantar kpd kepala BKPP pengiriman rekapitulasi daftar pengaturan jadwal kerja dan WFH	26 Maret 2020	1 berkas	Tekstual Fotocopy

FORMULIR DAFTAR ARSIP COVID

DAFTAR ARSIP COVID -19

SATUAN KERJA :

ALAMAT :

NO	KODE KLASIFIKASI	URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Purbalingga, November 2021
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

FORMULIR DAFTAR ARSIP FOTO PENYELAMATAN ARSIP COVID -19

CONTOH DAFTAR ARSIP FOTO PENYELAMATAN ARSIP COVID- 19

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	Foto Pemakan Jenasah Pasien Covid -19	02 Mei 2020	Desa	1 lembar
2	Foto Pemberian sembako terdampak covid - 19	03 Juni 2020	Desa	1 lembar

Purbalingga,

Nama

Jabatan

NIP.



TERIMA KASIH

SALAM SEHAT

Informasi Lebih Lanjut:

HERI MUNTO, SH :
081327054895

ATNO ADIWURYONO, SH:
081215979273

